

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumusan delik zina sebagai kejahatan di dalam KUHP dimaknai sebagai perbuatan berhubungan badan antara dua orang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam sebuah perkawinan. Delik zina dalam KUHP tidak mencakup perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat pada perkawinan. Hal ini karena adanya prinsip bahwa “*The State law just stopped in front of the bedroom*”, di mana Hukum Barat menjunjung tinggi privasi dan hak individual sepenuhnya, persetubuhan dijadikan delik dan hanya dapat dipidana sepanjang merugikan kepentingan orang lain yaitu suami atau istri dari para peserta zina.

Terdapat mekanisme penyelesaian delik zina yang sangat unik, dimiliki oleh masing-masing masyarakat adat, antara lain melalui mekanisme kekerasan yang dikenal dengan nama carok sebagaimana dijalankan oleh masyarakat madura. Carok adalah alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara duel untuk mempertahankan harga diri. Biasanya carok dilakukan oleh laki-laki yang istrinya berzina, dalam mempertahankan harga dirinya berduel dengan teman zina istrinya. Uniknya penyelesaian delik zina dengan carok adalah hal yang sangat menarik untuk diadakan penelitian dengan judul “**Delik Zina : Unsur Substansial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura**”.

B. PERMASALAHAN

1. Unsur-Unsur perbuatan apa sajakah yang harus terpenuhi dalam delik zina menurut hukum adat madura?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura?
3. Bagaimana kontribusi hukum pidana adat madura dalam memetakan perbuatan zina sebagai delik adat terhadap perumusan delik zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui tentang Unsur-Unsur perbuatan apa sajakah yang harus terpenuhi dalam delik zina menurut hukum adat madura?
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura?
3. Untuk menjabarkan kontribusi hukum pidana adat madura dalam memetakan perbuatan zina sebagai delik adat terhadap perumusan delik zina dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia

D. Luaran Capaian Penelitian

1. Laporan Penelitian
2. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi Masalah-Masalah Hukum

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan, nilai, serta pengertian¹.

Pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*, di mana ilmu hukum berada di antara pendekatan doktrinal (*normative approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*). Pendekatan ini untuk menggali data primer berupa nilai-nilai dan memaknai perilaku masyarakat lokal dalam menyelesaikan delik zina di masyarakat Bangkalan Madura, yang dihasilkan dari wawancara dengan para tokoh adat. Sedangkan Legal Research/ penelitian doctrinal digunakan untuk menggali teori-teori, konsep-konsep sebagai data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang terkait dengan permasalahan.

Lokasi penelitian di daerah Bangkalan – Madura, untuk menggali nilai-nilai lokal (adat) yang diambil tentang larangan zina dan penyelesaiannya. Informan terdiri dari atas para Tokoh Masyarakat Bangkalan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*.

Teknik analisa pada data primer dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari 1). Reduksi data 2). Penyajian data 3). Penarikan kesimpulan . Analisa data sekunder

¹Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, 2012, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 5

dianalisa dengan logika deduktif. Sementara itu metode validasi data menggunakan triangulasi.

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Unsur-Unsur Delik Zina Menurut Masyarakat Madura

Zina (bahasa Arab : الزنا, bahasa Ibrani : זניח – zanah) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Sedangkan zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.²

Delik zina menurut masyarakat Madura mempunyai unsur-unsur sebagaimana diberikan pada hukum adat daerah lainnya. Namun karena nilai-nilai adat masyarakat Madura didominasi oleh nilai-nilai Islam, maka pengertian dan unsur-unsur substansial delik zina pun diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Hal ini dikemukakan oleh Ustad Muniri sebagai tokoh masyarakat Bangkalan bahwa dalam budaya masyarakat Madura, karena mayoritas masyarakat Madura, terutama Bangkalan beragama Islam, maka perbuatan zina diadopsi dari Agama Islam itu sendiri, di mana zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan baik oleh orang-orang yang terikat dalam perkawinan ataupun orang-orang yang tidak terikat dalam perkawinan, seperti dilakukan oleh para remaja.³

Penegasan pengertian zina yang dianut oleh masyarakat Bangkalan dipertegas oleh Moh. Siri, salah seorang Belater dari Desa Socah Bangkalan, menurutnya bahwa sebagaimana pengaturan zina di dalam Hukum Islam, masyarakat Bangkalan juga mengakui sebagai perbuatan zina di mana terdapat Zina Biasa yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh sesama orang yang tidak terikat perkawinan, dan Zina Muhson yaitu

²<https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinahan-menurut-pandangan-islam>

³Wawancara Ust. Muniri Tokoh Agama Bangkalan, 11 September 2018

persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang masing-masing pihak atau salah atau pihak yang melakukannya sudah terlibat perkawinan.⁴

Sebagaimana di dalam hukum Islam yang dianutnya, maka masyarakat Bangkalan Madura pun menganggap perbuatan zina harus ada persetubuhan. Dalam hal pembuktiannya seseorang berzina atau tidak maka harus ada perilaku-perilaku yang mendekatkan pada perbuatan zina itu sendiri, seperti misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau masuk kamar hotel bersama-sama dan berada di dalam kamar tersebut.⁵

Berdasarkan pengertian perbuatan zina sebagaimana dikemukakan di atas, maka unsur—unsur zina versi masyarakat Bangkalan Madura, adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetubuhan di mana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan;
2. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan atau salah satunya dalam ikatan perkawinan;
3. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan.

Dalam hukum adat pada umumnya dan hukum yang berlaku pada masyarakat Bangkalan Madura pada khususnya menganggap zina sebagai delik yang paling kotor dan merusak harga diri seorang pria dan keluarga besarnya, terutama bagi perempuan yang bersuami. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagai delik adat maka perbuatan zina memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang mengganggu dan merusak kosmos baik dalam pengertian tatanan norma masyarakat maupun keseimbangan spiritual.

B. Mekanisme Penyelesaian Delik Zina Masyarakat Bangkalan Madura

Adapun mekanisme dalam menyelesaikan delik zina, terdapat dua macam, yaitu :

1. Dinikahkan, jika zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan;
2. Dengan Carok atau dibunuh, jika zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya khususnya pada wanita terikat dalam perkawinan.

Pada beberapa kasus zina di Bangkalan di antaranya ada yang sudah sampai mengandung, maka dalam budaya masyarakat Bangkalan, si anak yang ada dalam kandungan tersebut digugurkan atas persetujuan keluarga jika pihak laki-laki bukan

⁴Wawancara Moh. Siri, Tokoh Belater Desa Socah, Bangkalan, 12 September 2018.

⁵Wawancara Ust. Muniri Tokoh Agama Bangkalan, 11 September 2018

dianggap oleh keluarga bukan orang baik. Namun, jika pihak laki-lakinya kelihatan sebagai orang baik-baik maka mereka dinikahkan .

C. Kontribusi Adat Bangkalan – Madura Dalam Pemetaan Delik Zina Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Keseimbangannilai- nilai hukum membentuk karakter manusia Indonesia sebagai manusia yang ber karakter religius komunal, yang dibentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia inilah yang menjadi dasar berpikir yang mendasari sistem pidana nasional. Harmonisasi atau keseimbangan nilai-nilai hukum dalam masyarakat Bangkalan – Madura tercermin pula dalam keseimbangan antara nilai religius di mana nilai-nilai keislaman sangat mendominasi dan mendasari hubungan dalam masyarakat Bangkalan – Madura, terutama dalam memberikan batasan perbuatan zina, diartikan sebagaimana di dalam pengertian menurut Hukum Islam.

Nilai-nilai hukum dalam budaya masyarakat Bangkalan – Madura berkontribusi dalam perumusan delik zina di dalam RUU KUHP sebagai berikut⁶ :

Pasal 446

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:
- a. Laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
 - c. Laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Pasal 449

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

⁶RUU KUHP 2 Juli 2018

Pasal 450

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

RUU KUHP merumuskan persetubuhan yang dilakukan dengan kehendak bersama sebagai perbuatan yang dipidana terdiri atas :

- a. Zina yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya tidak terikat dalam perkawinan sah.
- b. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan tipu muslihat berupa janji mengawini;
- c. Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan;

Rumusan perbuatan zina sebagai delik di dalam RUU KUHP memperluas rumusan delik zina di dalam KUHP sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP yang intinya bahwa perbuatan zina yang diancam dengan pidana adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah.

BAB 3

KESIMPULAN

1. Unsur-unsur substansialnya zina pada masyarakat Bangkalan Madura adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan atau salah satunya tidak terikat dalam perkawinan sah.
2. Mekanisme penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Bangkalan – Madura, jika pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan sah, maka diselesaikan melalui musyawarah keluarga keduanya dinikahkan. Sementara itu jika pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, maka penyelesaian dilakukan melalui carok yaitu pembunuhan dengan alasan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.

3. Kontribusi nilai-nilai hukum budaya masyarakat Bangkalan – Madura dalam memberikan batasan perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 446 sampai dengan Pasal 450 RUU KUHP tentang persetubuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta,
- Akhmad Dzukaul Fuad, Kategori dan Ekspresi Linguistik Dalam Carok Pada Masyarakat Madura, Jurnal Pendidikan dan Sains, ISSN: 2406-7563.
- Bambang Sambu Budiyanto, dikutip oleh Mahrus Ali dalam Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010 : 85 – 102.
- Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Cetakan ke I, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP, Cetakan 2, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti.
- Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, AL Istimbath : Jurnal Hukum Islam STAIN Curup – Bengkulu, p. Issn : 2548 – 3374 – e issn : 2548 – 3382.
- David Garland, Punishment and Modern Society A study in Social Theory, 1990, Chicago : Chicago University Press.
- Firdaus Wong Wai Hung, Agama Manakah Yang Membenarkan Zina, 14 Maret 2017.
- G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, Deventer Holland, Kluwer.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 2003, Bandung, Mandar Maju.
- Henu Astantya, Tindak Pidana Perzinahan Pada Masyarakat Di Jawa, Linked in, 1 Maret 2017.
- Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 KUHP Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56. Th XIV (April. 2012), pp. 165- 171.
- Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, 2012, Yogyakarta, Paradigma.
- Latief Wiyata, Madura Yang Patuh? Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura, 2003. Jakarta, CERIC – FISIP UI,
- Marc Ancel, Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems, 1965, Cambridge, London.
- P.A. F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik- Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Edisi Kedua, 2009, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarto, Hukum Pidana, 2009, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip.

- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- Masuk Islam.com, Pengertian Zina, Macam-Macam Zina, Hukum Zina, Dampak Zina, Dan Hukuman Bagi pezina, 07/ 04/ 2013.
- Pandangan Al Kitab tentang Perzinaan, JW. ORG / Situs Web Resmi Saksi-Saksi Yehuwa
- Pemerkosaan dan Zina Dalam Hindu, paduarsa.com.